

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NOMOR 70 TAHUN 2009 TENTANG PENDIDIKAN INKLUSI

(Nur Khasanah, Adelina Hasyim, Yunica Nurmalisa)

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa di SMP Negeri 2 Belitang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian atau informan yaitu Kepala sekolah, dua orang guru dan dua orang staf tata usaha di SMP Negeri 2 Belitang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pokok, sebagai penunjangnya menggunakan observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 di SMP Negeri 2 Belitang belum optimal dikarenakan pendukung dalam pendidikan inklusi tidak tersedia seperti sarana dan prasara, Guru Pembimbing Khusus, Pendanaan dan kerjasama dengan ahli. Komponen pendidikan inklusi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusi.

Kata kunci : implementasi, pendidikan inklusi, peserta didik.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PERMENDIKNAS NUMBER 70 OF 2009 CONCERNING INCLUSIVE EDUCATION

(Nur Khasanah, Adelina Hasyim, Yunica Nurmalisa)

The purpose of this study is to describe and analyze the Implementation of Permendiknas Number 70 of 2009 concerning Inclusion Education for Students Who Have Abnormalities and Have the Potential of Intelligence and / or Special Talents in SMP Negeri 2 Belitang. The research method used in this study is descriptive qualitative with the research subjects or informants, namely the principal, two teachers and two administrative staff at SMP Negeri 2 Belitang. Data collection techniques in this study use interview techniques as the main technique, as supporting using observation and documentation.

The results showed that the Implementation of Permendiknas Number 70 of 2009 in SMP Negeri 2 Belitang was not optimal because supporters in inclusive education were not available such as facilities, Special Advisor Teachers, Funding and collaboration with experts. The component of inclusive education is very influential on the implementation of inclusive education services.

Keywords: implementation, inclusive education, students.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang dengan tujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”.

Amanat hak atas pendidikan bagi penyandang kelainan atau ketunaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan dalam pasal 32 bahwa “pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial.” Ketetapan dalam undang-undang ini sangat berarti bagi anak penyandang kelainan karena memberikan landasan yang kuat bahwa mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama sebagaimana yang diberikan kepada anak normal lainnya dalam pendidikan dan pengajaran.

Pemerintah Indonesia sendiri berusaha memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan diselenggarakannya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Munculnya pendidikan inklusi dikarenakan terbatasnya Sekolah Luar Biasa atau masih terbatas jumlahnya yaitu baru ada di tingkat kecamatan dan itu pun milik swasta, sementara SLB negeri ada di tingkat kabupaten. Sehingga peluang untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengembangkan dirinya sangat kecil.

Pendidikan dikemas sedemikian rupa menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Saat ini bahkan dikembangkan pendidikan inklusif yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Dengan adanya peraturan menteri ini akan sangat membantu anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berada di daerah-daerah terpencil. Pendidikan inklusi adalah sistem pengajaran yang pelaksanaannya menggabung-

kan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dan menggambarkan separuh atau seluruh waktu belajar siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, dimana lingkungan sekolah memberi kebebasan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial dan emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Dengan demikian meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, namun tidak signifikan sehingga mereka tidak perlu mendapatkan pelayanan pendidikan khusus, maka anak tersebut tidak termasuk anak kebutuhan khusus. Namun sebaliknya, walaupun kelihatannya secara fisik mental-intelektual, sosial dan emosional tidak mengalami kelainan namun apabila dalam pendidikan mereka memerlukan layanan khusus maka anak tersebut dikatakan

sebagai anak berkebutuhan khusus. Untuk memahami lebih lanjut anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan maka pengenalan mengenai anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan.

Salah satu sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah menjadi penyelenggara pendidikan inklusi adalah SMP negeri 2 Belitang. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru di SMP Negeri 2 Belitang, didapatkan informasi bahwa SMP Negeri 2 Belitang telah menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sejak tahun pelajaran 2015/2016 dan menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis tunagrahita dan tunadaksa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tentu saja Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua orang guna terselenggaranya tujuan pendidikan inklusi dengan baik. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan

Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (studi deskriptif di SMP Negeri 2 Belitang).

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi menurut pasal 1 Permendikbud No 70 Tahun 2009 adalah “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”

Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Dinie Ratri Desiningrum (2016 : 1) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak.

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

- a. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra)

- b. Anak dengan gangguan pendengaran (Tunarungu)
- c. Anak dengan gangguan intelektual (Tunagrahita)
- d. Anak dengan gangguan pada anggota tubuh (Tunadaksa)
- e. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tunalaras)
- f. Anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa (*Gifted and talented*)
- g. Anak lamban belajar (*Slow Learner*)
- h. Anak dengan gangguan autisme
- i. Indigo

Peran Sekolah dalam Pelayanan ABK

Sekolah sebagai komponen fungsi merupakan empat untuk mengajar siswa, tempat untuk melatih dan memberi instruksi tentang suatu keilmuan dan keterampilan tertentu kepada siswa. sekolah sebagai komponen fisik merupakan satu kompleks bangunan laboratorium, fasilitas fisik yang disediakan sebagai pusat kegiatan belajar mengajar Webster dalam Nanang Purwanto (2014 : 78).

Berdasarkan prosedur operasi standar pendidikan inklusif ruang lingkup

manajemen sekolah sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengelolaan peserta didik
2. Pengelolaan kurikulum
3. Pengelolaan pembelajaran
4. Pengelolaan penilaian
5. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan
6. Pengelolaan sarana dan prasarana
7. Pengelolaan pembiayaan
8. Pengelolaan sumber daya masyarakat

Pelaksanaan manajemen Sekolah Inklusi

Berdasarkan buku pedoman manajemen sekolah inklusi yang dikeluarkan oleh direktorat pembinaan sekolah luar biasa direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah menguraikan beberapa hal dalam pelaksanaan sekolah berbasis inklusi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan inklusi secara efektif dan efisien yakni sebagai berikut:

- 1) Manajemen kesiswaan
Manajemen kesiswaan terdiri atas:
 - a. Penerimaan peserta didik baru, didalamnya meliputi identifikasi, asesmen, dan penempatan peserta didik

- b. Program bimbingan, penyuluhan dan pelatihan

- c. Kehadiran peserta didik

2) Manajemen kurikulum

Kurikulum pada sekolah inklusi secara khusus meliputi modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik, menjabarkan kalender pendidikan, menyusun jadwal pelajaran, mengatur pelaksanaan program pengajaran, mengatur kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler, mengatur pelaksanaan penilaian, kenaikan kelas, membuat laporan kemajuan belajar, usaha perbaikan dan pengayaan.

3) Manajemen tenaga kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan dimaksudkan untuk pengelolaan sumber daya manusia kependidikan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

4) Manajemen sarana dan prasarana

Manajemen sarana dan prasarana dalam sekolah inklusif bertugas untuk merencanakan pengadaan, pengorganisasian, pemeliharaan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, evaluasi kebu-

tuhan agar memberikan kontribusi hasil yang optimal dalam pembelajaran inklusi.

5) Manajemen keuangan

Manajemen keuangan dalam sekolah inklusi ditujukan untuk identifikasi/assesmen, modifikasi kurikulum, media, metode, intensif bagi tenaga yang terlibat, pengadaan sarana dan prasarana, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

6) Manajemen lingkungan

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan sosialisasi sekolah inklusi. Pemahaman dan kepedulian masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, pengawasan dan evaluasi dan pendanaan. Ketika telah tercipta kerjasama antara sekolah dan masyarakat dengan banyaknya dukungan akan berdampak pada terciptanya iklim belajar yang kondusif di sekolah inklusi.

Peran Guru dalam Pelayanan ABK

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual maupun klasikan, di sekolah maupun di luar sekolah N.A Ametembum dalam Syaiful Bahri Djamarah (2009 : 32).

Pengertian lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa “guru adalah pendidik profesional, dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.”

Peran dari guru pembimbing khusus merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan program pendidikan inklusif. Guru Pembimbing Khusus (GPK) memiliki tugas penting dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus.

Penelitian Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian dilakukan oleh Muthia Larasati program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016. Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program pendidikan inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subjek dan objek penelitian.

2. Tingkat nasional

Penelitian dilakukan oleh Supardjo Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas

Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian Pengelolaan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri III Giriwono Wonogiri tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: perencanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, dan evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu dengan metode deskriptif kualitatif serta dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan kata-kata, gambar, dokumen dan angka yang ditampilkan merupakan data pelengkap.

Kerangka Pikir

1. Sekolah
2. Guru
3. Manajemen sekolah dalam pendidikan inklusi
4. Pelayanan pendidikan inklusi
5. Terdapat 6 manajemen penyelenggara pendidikan inklusi

dalam pelayanan anak
berkebutuhan khusus.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa (Studi Deskriptif di SMP Negeri 2 Belitang). Secara khusus untuk mendeskripsikan aspek sumber daya pendidikan inklusif dan peran guru dalam pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP negeri 2 Belitang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Herdiansyah Haris (2012: 9) “penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.” Penelitian kualitatif juga bertujuan

untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek dan subjek yang apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010: 24).

Informan dan unit analisis

Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowbowling sampling*. Menurut Arikunto (2009: 16) “*snowbowling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan.”

Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala sekolah di SMP Negeri 2 Belitang
2. Guru di SMP Negeri 2 Belitang
3. Tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Belitang

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal atau akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri

yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data, analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator. Penelitian ini menggunakan *human instrument*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara mengamati proses pelaksanaan pendidikan inklusif menurut aturan permendiknas agar mengetahui bagaimana implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa di SMP Negeri 2 Belitang.

2. Teknik wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah

pertanyaan secara lisan kepada siswa, tenaga pendidik, dan kepala sekolah untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut pelaksanaan program pendidikan inklusif menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (*semistructur interview*).

3. Teknik dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (catatan peristiwa masa lalu) yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 2 Belitang yaitu data-data tentang pelaksanaan pelayanan pendidikan inklusi di sekolah. Dokumentasi yang digunakan adalah setiap bahan-bahan tertulis, yang kemudian didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Uji Validitas

1. Memperpanjang waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari

subjek kepada peneliti, mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga komponen analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu ketelitian dan rinci kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti sebuah proses pemilihan, pemusatan kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis di lapangan (*field note*).

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan sesuai dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan.

3. Verifikasi (*conclusion drawing*)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, selanjutnya mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus

Proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Belitang pada umumnya berjalan sesuai dengan kurikulum yang

berlaku. Sekolah menggunakan model kurikulum reguler dalam melaksanakan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Peran guru pendamping dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas

SMP Negeri 2 Belitang memiliki jumlah guru yang cukup banyak. Namun pembinaan dan pengadaan tenaga pendidik di SMP tersebut belum memadai, misalnya tidak adanya guru pembimbing khusus atau guru yang berasal dari pendidikan luar biasa.

3. Sarana prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus
Sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 2 Belitang belum memadai. Hanya ada ruang Bimbingan Konseling yang disediakan untuk digunakan sebagai tempat bimbingan inklusi.

B. Temuan dalam penelitian

1. Proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus

Temuan penelitian dalam proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus adalah materi yang disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus, sekolah menggunakan kurikulum reguler, penerimaan peserta didik baru yang tidak memperhatikan kriteria tertentu, dan anak berkebutuhan khusus diberikan bimbingan hingga dinaikkan level menjadi siswa reguler.

2. Peran guru pendamping dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas

Temuan penelitiannya adalah belum tersedianya GPK dari PLB, guru pembimbing berasal dari guru yang pernah mendapatkan pelatihan inklusi, guru pendamping bekerjasama dalam menangani ABK, dan terdapat 7 guru yang menjadi guru pendamping.

3. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus

Adapun temuan penelitiannya yaitu ruang BK yang dijadikan sebagai ruang bimbingan

inklusi, sarana siswa reguler sama dengan sarana ABK, belum tersedianya sarana yang sesuai dengan kebutuhan ABK, serta pemerintah daerah yang belum memberikan bantuan sarana dan dana.

C. Pembahasan

1. Proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus

Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan peneliti, SMP Negeri 2 Belitang menggunakan model kurikulum reguler. Kurikulum reguler dapat digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus seperti tunadaksa dan tunagrahita atau autis yang tidak mengalami gangguan intelektual.

2. Peran guru pendamping dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas

Setelah dilakukan observasi oleh peneliti, pelaksanaan pendidikan inklusi di SMP Negeri 2 Belitang belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya guru pembimbing khusus

(GPK) yang nantinya akan mengelola program bimbingan peserta didik berkebutuhan khusus, meskipun sudah ada guru di sekolah tersebut yang pernah mengikuti pelatihan inklusi.

3. Sarana prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran siswa berkebutuhan khusus

Setelah peneliti melakukan pengamatan, sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 2 Belitang belum memadai, hanya ada ruang Bimbingan Konseling yang dirangkap menjadi ruang bimbingan inklusi. pihak sekolah menggunakan sarana umum yang ada untuk menjalankan pelayanan pendidikan inklusi. peserta didik berkebutuhan khusus juga menggunakan aksesibilitas dan media yang sama seperti peserta didik pada umumnya.

D. Keunikan dalam penelitian

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum tersedianya guru pembimbing khusus di SMP Negeri 2 Belitang

2. Sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Belum adanya dana yang dianggarkan pemerintah daerah
4. Tidak ada perbedaan materi pembelajaran hanya ada pengurangan porsi materi.
5. Belum terjalinnya kerjasama dengan ahli, dokter, psikiater, tenaga medis dan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, Implementasi permen-diknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 2 Belitang belum optimal dikarenakan beberapa pendukung penting dalam pendidikan inklusi tidak tersedia misalnya GPK (Guru Pembimbing Khusus), belum ada media belajar, sarana penunjang aktivitas siswa yang memadai seperti kursi roda, dan alur jalan kursi roda SMP Negeri 2 Belitang juga belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dan belum melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti masyarakat luas dan para ahli, dokter, psikiater dan lain-lain.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah

Pemerintah daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus seperti kursi roda dan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Selain itu, dalam pendidikan inklusi membutuhkan bantuan pendanaan untuk pelayanan pendidikan inklusi yang digunakan untuk keperluan yang mendesak dan intensif untuk guru pembimbing. Pemerintah juga harus menyediakan bantuan bagi tersedianya sumber daya manusia seperti (GPK) Guru Pembimbing Khusus yang berasal dari Pendidikan Luar Biasa,

2. Bagi sekolah

SMP Negeri 2 Belitang mempersiapkan diri untuk pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di masa mendatang dengan menyiapkan jalan dan alur khusus untuk kursi roda, serta menyediakan ruang tersendiri untuk bimbingan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Sekolah memberikan setidaknya sosialisasi dan pelatihan inklusi kepada guru mata pelajaran. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda dari metode, materi, hingga evaluasi dan penilaian.

Dibutuhkan kerjasama dengan seluruh warga sekolah maupun masyarakat sekitar untuk terus mengembangkan pelaksanaan pendidikan inklusi yang sesuai dengan Permendiknas No 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi. Selain masyarakat sekolah harus membangun kerjasama dengan ahli, dokter, psikoterapis dan lainnya dalam penanganan peserta didik berkebutuhan khusus, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk keberhasilan dan kemajuan pendidikan di SMP Negeri 2 Belitang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2009. *Psikologi Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekjen Depdiknas.
- Desiningrum Dinie Ratri. 2016. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Psikosain
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.
- Larasati, Muthia. 2016. Skripsi. Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Tentang *Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa*. Jakarta : Depdiknas
- Purwanto, Nanang. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1 Dan 2
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen